



TESIS

**PRINSIP *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS* DALAM PERSPEKTIF
DIBERLAKUKANNYA TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN**

*The Principle of lex specialis derogat legi generalis in the
perspective of the implementation of the Act of the
Eradication of the criminal acts of corruption to the
banking crimes*

Oleh:

YUSUB WIBISONO, SH.
NIM: 120720101004

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM PIDANA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

TESIS

**PRINSIP *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS* DALAM PERSPEKTIF
DIBERLAKUKANNYA TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN**

*The Principle of lex specialis derogat legi generalis in the
perspective of the implementation of the Act of the
Eradication of the criminal acts of corruption to the
banking crimes*

Oleh:

YUSUB WIBISONO, SH.
NIM: 120720101004

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM PIDANA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

**PRINSIP *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS* DALAM PERSPEKTIF
DIBERLAKUKANNYA TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN**

*The Principle of lex specialis derogat legi generalis in the
perspective of the implementation of the Act of the
Eradication of the criminal acts of corruption to the banking
crimes*

TESIS

Untuk memperoleh Gelar Magister dalam program Studi Ilmu Hukum
pada Program Pascasarjana Universitas Jember

Oleh:

YUSUB WIBISONO, SH.
NIM: 120720101004

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM PIDANA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI

Tanggal 01 September 2014

Oleh

Dosen Pembimbing Utama

Dr. FANNY TANUWIJAYA, SH., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. NURUL GHUFRON, SH., MH.
NIP. 197409221999031003

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

Dr. JAYUS, SH., M.Hum.
NIP. 195612061983031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

JUDUL TESIS : Prinsip *lex specialis derogat legi generalis* dalam perspektif diberlakukannya tindak pidana korupsi terhadap tindak pidana perbankan

Tanggal Ujian : 08 September 2014
SK Penguji : No. 269/UN25.1.1/SP/2014 tanggal 3 September 2014

Nama Mahasiswa : Yusub Wibisono, SH.
NIM : 120720101004
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum
Konsentrasi : Sistem Peradilan Pidana

KOMISI PEMBIMBING :

Pembimbing Utama : Dr. Fanny Tanuwijaya, SH., M.Hum.
Pembimbing Anggota : Dr. Nurul Gufron, SH., MH.

TIM DOSEN PENGUJI :

Dosen Penguji 1 : Prof. Dr. M. Arief Amrullah, SH, M.Hum.
Dosen Penguji 2 : Dr. Jayus, SH., M.Hum.
Dosen Penguji 3 : Dr. Fanny, SH.,M.Hum.
Dosen Penguji 4 : Dr. Nurul Gufron, SH., MH.

**PRINSIP *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI*
GENERALIS DALAM PERSPEKTIF
DIBERLAKUKANNYA TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN**

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji
Pada tanggal : 8 September 2014
Susunan Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Prof.Dr.M.Arief Amrullah, SH, M.Hum.
NIP. 196001011988021001

Dr. Jayus, SH., M.Hum.
NIP. 195612061983031003

Anggota I

Anggota II

Dr. Fanny Tanuwijaya, SH.,M.Hum.
NIP. 196506031990022001

Dr. Nurul Gufron, SH., MH.
NIP. 197409221999031003

Mengesahkan,
Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Jember
Dekan,

Prof Dr. Widodo Ekatjahjana, SH, Mhum.
Nip. 197105011993031001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Tesis ini merupakan hasil gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, September 2014
Yang membuat pernyataan,

Yusub Wibisono, SH.
NIM. 120720101004

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalam mualaikum warakhmatullahi wabarakaatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmad, Petunjuk serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis hukum dengan judul :

“ Prinsip *lex specialis derogat legi generalis* dalam perspektif diberlakukannya tindak pidana korupsi terhadap tindak pidana perbankan“

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Jember Drs. Mohammad Hasan MSc, PhD yang telah menyediakan sarana dan Prasarana Pendidikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum ;
2. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Jember , Prof DR. Rudi Wibowo MS atas kesempatan untuk menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Pasca Sarjana Universitas Jember ;
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, SH, M.Hum yang memberikan inspirasi bagi penulis untuk terus belajar menimba ilmu ;
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Dr. Jayus, SH, Mhum, sekaligus Sekretaris Panitia Penguji, atas kesempatan dan dorongan yang

diberikan pada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister.

5. Prof. DR. M. Arief Amrullah, SH, M.Hum selaku Ketua Panitia Penguji Tesis sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan motivasi kepada Penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Program Magister ;
6. Orang tuaku alm. Bapak Soepi'i dan Ibunda Murlin yang telah memberikan kasih sayang, membesarkanku dan memberi dorongan / motivasi untuk dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, semoga penulis bisa menjadi kebanggaan Mereka ;
7. Kepada Isteriku tercinta Dwi Citra Yulia, SPd dan anak-anakku Rangga Pratama Bayu Satriya dan Rendy Shane Luciano Wiyakta atas kesabaran dan selalu memberikan semangat serta dukungannya ;
8. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada rekan-rekan sejawat sdr. Tendik Wicaksono, SH, Mhum, Eko Wahyudi, SH, Mhum yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian tesis ini.
9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, atas bantuan Informasi dan data-data pendukung serta bahan-bahan hukum yang berkenaan dengan substansi penulisan tesis ini.
10. Rekan-rekanku (Pasca Sarjana Ilmu Hukum Unej Angkatan Tahun 2012), teman-teman yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, atas dorongan dan semangat yang telah banyak memberikan bantuan dalam memperlancar penulisan tesis ini.
11. Semua pihak yang mendukung terselesaikannya penulisan tesis ini.

Ttd

Penulis

RINGKASAN

Dari adanya penjabaran macam-macam tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), dapat diketahui bahwa subyek hukum dari tindak pidana perbankan itu sendiri yaitu Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank, serta pihak-pihak lain yang terkait dengan kegiatan bank. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan subyek hukum dalam tindak pidana perbankan sudah diatur secara tegas dan jelas.

Terhadap terjadinya tindak pidana perbankan, maka di dalam penanganannya, ketentuan peraturan yang diterapkan tentunya yang khusus mengatur hal tersebut, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Perbankan. Namun demikian, di dalam prakteknya seringkali terjadi yakni terhadap adanya tindak pidana perbankan, penegak hukum tidak menerapkan Undang-Undang Perbankan melainkan justru menggunakan undang-undang yang lainnya, yaitu berupa Undang-Undang Nomor No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Adanya penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap terjadinya tindak pidana perbankan, tentunya terkait erat dengan pengaturan subyek hukum yang ada di dalam Undang-Undang Perbankan itu sendiri. Dengan kata lain dikarenakan pelaku tindak pidana perbankan tersebut tidak tercantum atau tidak terakomodir di dalam Undang-Undang Perbankan, maka agar pelaku tersebut tetap dapat dijatuhi hukuman, adanya penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang diperlukan. Hal ini dapat dikatakan merupakan wujud perluasan subyek hukum yang telah diatur secara limitatif di dalam Undang-Undang Perbankan itu sendiri. Pertimbangan lain yang diambil oleh penegak hukum di dalam menerapkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap pelaku kejahatan perbankan, yaitu tidak terlepas dari adanya upaya untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh bank, sebab dana yang tersimpan di dalam bank tidak menutup kemungkinan berasal dari keuangan negara yang tersimpan bersamaan dengan dana yang berasal dari nasabah.

Dari penjelasan di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian tesis ini yaitu mengenai prinsip *lex specialis derogat legi generalis* dalam perspektif diberlakukannya tindak pidana korupsi terhadap tindak pidana perbankan serta formulasi ketentuan tindak pidana perbankan di masa yang akan datang.

Tipe penelitian dalam tesis ini berupa yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*), sehingga diperoleh kesimpulan yaitu adanya perluasan ruang lingkup tindak pidana korupsi terhadap tindak pidana perbankan, apabila dihubungkan dengan prinsip *lex specialis derogat legi generalis*, maka perluasan dimaksud bertentangan dengan

prinsip tersebut. Hal ini dikarenakan kedua undang-undang tersebut sama-sama merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan apabila kedua undang-undang tersebut disandingkan, maka tidak ada kekhususan undang-undang yang satu terhadap undang-undang yang lain. Adanya ketentuan pasal 14 pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai dapat diterapkannya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap setiap pelanggaran/tindak pidana yang telah diatur secara khusus di dalam undang-undang tertentu, dengan syarat di dalam undang-undang tertentu tersebut telah terdapat ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi, ternyata juga belum dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menerapkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap tindak pidana perbankan. Hal ini dikarenakan di dalam Undang-Undang Perbankan sendiri tidak terdapat pasal yang mengatur secara tegas ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 14 pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dengan sendirinya, dengan tidak adanya pasal yang khusus mengatur ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 14 tersebut, maka terhadap setiap tindak pidana perbankan yang terjadi, ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diterapkan. Oleh karena itu, adanya formulasi yang tepat di dalam mengatur ketentuan tindak pidana perbankan di masa yang akan datang mutlak diperlukan dalam rangka untuk untuk menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang ada dan supaya ke depannya konflik norma tidak timbul lagi. Ini dikarenakan dari adanya perluasan ruang lingkup tindak pidana korupsi terhadap tindak pidana perbankan atau dengan kata lain adanya penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap pelaku tindak pidana perbankan, sebagaimana contoh kasus yang diangkat dalam penelitian ini, ternyata hal ini dapat memunculkan konflik norma.

Adapun saran yang diajukan dari hasil penulisan tesis ini yaitu agar di dalam setiap pelaksanaan ketentuan peraturan Perundang-undangan, termasuk pula Undang-Undang Perbankan maupun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat diterapkan dengan baik dan benar oleh aparat penegak hukum, mulai penyidik/kepolisian, penuntut umum sampai hakim, maka sudah selayaknya di dalam prakteknya penegak hukum tidak bertindak secara sewenang-wenang yang justru dapat berakibat timbulnya pelanggaran atas ketentuan peraturan Perundang-undangan itu sendiri, dan juga berkaitan dengan diperlukannya revisi terhadap Undang-Undang Perbankan secepat mungkin yang bertujuan untuk mengatasi konflik norma yang ada sebagai akibat diterapkannya perluasan tindak pidana korupsi terhadap tindak pidana perbankan, maka sudah sewajarnya apabila Pemerintah dan DPR sesegera mungkin duduk bersama dan membahas masalah revisi dimaksud.

Kata kunci :

Tindak pidana perbankan, *lex specialis derogat legi generalis*, konflik norma.

SUMMARY

Based on the elaboration of the types of criminal act regulated in the Act num.10 of 1998 regarding the revision of the Act num.7 of 1992 regarding Banking (later termed as Act of Banking), it is found that the subjects of law of the banking criminal act are the member of Board of Commissioner, Board of Direction, or bank officers, as well as other parties who are closely connected to the banking activities. This reveals that the determination of the subjects of law of the banking crime is both loud and clear.

In handling the criminal acts of banking, the regulatory Act being used should be the Act of Banking. However, the current practices of case handlings show that the law enforcement officers employ the Act num. 31 of 1999 regarding the eradication of criminal acts of corruption which has been amended by the Act num. 20 of 2001 (later termed as the Act of the eradication of criminal acts of corruption) instead of the Act of Banking.

The implementation of the Act of the eradication of criminal acts of corruption to the banking crimes is closely related to the determination of the subject of law of the Act of Banking itself. Since the subjects of law are not explicitly mentioned or are not being accommodated into the Act of Banking, there is an immediate need of employing the Act of the eradication of criminal acts of corruption so as to assure that the offender is given the sentence. This immediate step is the manifestation of the expansion of the subjects of law which has previously been arranged by the Act of Banking. Another consideration taken by the law enforcement officers in applying the Act of the Eradication of the criminal acts of corruption is the attempts of regaining the bank's loss; since the fund itself may be sourced by the state's funding altogether with the bank's customer's fund.

*Based on the abovementioned explanation, this thesis raises the problems regarding the principle of *lex specialis derogat legi generalis* in the perspective of the implementation of the Act of the Eradication of the criminal acts of corruption to the banking crimes as well as the formulation of the provisions regarding the banking crime acts in the future.*

*This thesis is a normative judicial one and employs statute approach, conceptual approach and, case approach. The conclusion of this thesis states that the domain expansion of the criminal acts of corruption to the banking crimes, when related to the principle of *lex specialis derogat legi generalis* goes against the principle itself. This is due to the fact that both of the Acts are *lex specialis* of KUHP. Thus, if both Acts are put side by side, there will be no particularity of one Act to another. Article 14 of the Act of the eradication of criminal acts of corruption regulates the possibility of applying the Act to any criminal acts/violations which have been regulated in the other Acts on the condition that those Acts state strictly that the violation against the Acts' provisions are classified as the criminal acts of corruption. However, this does not play into effect on the banking crime acts due to the absence of the article which strictly regulate the provisions as described in article 14 of the Act of the eradication of*

the criminal acts of corruption. Therefore, the regulations of the Act of the Eradication of criminal acts of corruption are not applicable to any banking crime acts. The proper formulation in engaging the provisions of the banking crime acts is absolutely important in the future. This is to address the existing problems, as well as to prepare for future conflicts of norms, since the expansion of the domain of the Act of the eradication of criminal acts of corruption to the Act of Banking as raised in the problem presented in this thesis proves to raise the conflict of norms.

This thesis suggests that in implementing each and every regulation and Act, including the Act of Banking and the Act of the eradication of the criminal acts of corruption, law enforcement officers (police force, attorneys, prosecutors, and judges) are open to equal practice and are just in order to avoid haphazard actions which lead to the violations of the regulations and Acts themselves. In addition, revisions to the Act of Banking are of prime important so as to help overcome the conflict of norms resulted from the excess of the expansion of implementation of the criminal acts of corruption to the banking crime acts. Hence, Government and the House of Representatives are in immediate needs of discussing the revisions, respectively.

Keywords: banking crime acts, lex specialis derogat legi generalis, conflict of norms

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis yang berjudul : ” *Prinsip Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dalam Perspektif Diberlakukannya Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Perbankan*”.

Di dalam penelitian ini disajikan pokok-pokok bahasan tentang ada tidaknya pertentangan antara prinsip *lex specialis derogat legi generalis* dengan adanya pemberlakuan tindak pidana korupsi terhadap tindak pidana perbankan serta formulasi ketentuan tindak pidana perbankan di masa yang akan datang.

Besar harapan peneliti supaya hasil penelitian tesis ini dapat berdayaguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi seputar permasalahan mengenai prinsip *lex specialis derogat legi generalis* dalam perspektif diberlakukannya tindak pidana korupsi terhadap tindak pidana perbankan. Namun demikian, peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri peneliti pada saat melakukan penelitian tesis ini. Oleh karena itu, untuk perbaikan dan penyempurnaan penelitian tesis ini, peneliti senantiasa menerima kritik dan saran dari semua pihak.

Jember, September 2014

Yusub Wibisono, SH.
NIM. 120720101004

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
SAMPUL DALAM	ii
PERSYARATAN GELAR	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
RINGKASAN	x
<i>SUMMARY</i>	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.3.1 Tujuan Umum	14
1.3.2 Tujuan Khusus	14
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.4.1 Manfaat Teoritis	15
1.4.2 Manfaat Praktis	15
1.5 Metode Penelitian	15

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	23
2.1 Tinjauan tentang Perbankan	23
2.1.1 Sejarah Perbankan	23
2.1.2 Konsep Bank dalam Perbankan	29
2.2 Konsep Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana di Bidang Perbankan	31
2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan	39
2.4 Pengertian prinsip <i>Lex specialis derogat legi generalis</i>	52
BAB III. KERANGKA KONSEPTUAL	61
BAB IV. PEMBAHASAN	68
4.1 Perluasan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Perbankan Dihubungkan Dengan Prinsip <i>Lex Specialis Derogat Legi Generalis</i>	68
4.2 Formulasi Ketentuan Tindak Pidana Perbankan di Masa Yang Akan Datang	96
BAB V. PENUTUP	100
5.1 Kesimpulan	100
5.2 Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	